



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAJAR ADHY NUGROHO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
3. NHK : 962046

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.922.344.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/50 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.027.000
4. Tanah Seluas 1.460 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.294.650.000
5. Tanah Seluas 1.185 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.154.007.000
6. Tanah Seluas 972 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.049.760.000
7. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 378.000.000
8. Tanah Seluas 137 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 95.900.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/82 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **259.300.000**



1. MOTOR, HONDA NF 125 TA Tahun 2008, HASIL SENDIRI	Rp.	4.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	235.000.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI	Rp.	20.300.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	42.666.960
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.224.310.960
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.224.310.960

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.